

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan dapat dipandang sebagai proses penting untuk memenuhi janji kemerdekaan dan pendidikan yang berkualitas akan mencetak generasi masa depan yang juga berkualitas. Hal ini senada dengan ungkapan Baswedan dalam kata pengantar buku Chatib (2014, hlm. xiii) bahwa untuk mencetak generasi muda yang berkualitas, tentunya dibutuhkan guru yang juga berkualitas. Dalam hal ini, Bacon berpendapat bahwa “*Knowledge is Power*” seperti yang dikutip Rifa’i (2011), yakni:

Pengetahuan adalah sumber kekuatan bagi manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing hidupnya di dunia ini. Pengetahuan yang demikian, hanya bisa terwujud melalui pendidikan yang baik, yakni sebuah pendidikan yang mengandung relasi antara pendidik dengan peserta didik.

Adapun relasi yang dimaksudkan disini adalah adanya hubungan timbal balik antara pendidik dengan peserta didik, dimana peserta didik tidak dianggap sebagai obyek semata yang kosong yang siap dibentuk oleh pendidik. Akan tetapi peserta didik harus dianggap sebagai subyek yang mempunyai karakteristik sama seperti halnya pendidik.

Sementara itu pendidikan politik adalah sebuah upaya pendidikan berkelanjutan yang mempelajari masalah politik pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang dalam lingkup lokal, nasional, regional bahkan internasional. Pendidikan politik menjadi syarat bagi warga negara terutama yang telah dewasa agar bisa menjadi warga negara yang melek politik, mengetahui informasi jalannya pemerintahan, memahami prosedur demokrasi, mengetahui peraturan perundang-undangan serta kemampuan berpolitik lainnya untuk mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab.

Pendidikan politik merupakan bukti nyata atas kepedulian dan keseriusan partai politik dalam melahirkan warga negara yang cerdas politik, yakni warga negara yang bertanggung jawab dalam bidang politik. Hal tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 pasal 11 huruf (e) tentang partai politik

yang menyatakan bahwa partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.

Pendidikan politik penting untuk dilaksanakan, terutama oleh partai politik dalam rangka membentuk karakter warga negara yang melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya serta bersedia mengikuti proses politik yang dilaksanakan melalui keluarga, sekolah, masyarakat maupun oleh negara, yakni melalui pemilihan umum (pesta demokrasi) setiap lima tahun sekali untuk mewujudkan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Sebab menurut Plato, sebagaimana yang dikutip oleh Rapar (2002, hlm.40) bahwa:

Pemerintahan suatu negara akan menjadi baik dan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia hanyalah apabila kekuasaan dalam negara diserahkan pada para filsuf, artinya para filsuf tersebut adalah negarawan yang akan berhasil membebaskan rakyatnya dari segala bentuk kesengsaraan dan duka nestapa yang dihasilkan melalui proses rekrutmen politik maupun pendidikan politik.

Disisi lain, walaupun pendidikan politik mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran politik pada seluruh warga negara, namun pendidikan politik di Indonesia masih mempunyai banyak kerapuhan, diantaranya:

*Pertama*, pendidikan politik sejak 15 tahun terakhir ini belum berjalan secara maksimal dan cenderung sporadis. Partai politik yang seharusnya memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pendidikan politik bagi kadernya dan simpatisan tidak berjalan sebagaimana mestinya. *Kedua*, pemerintah melalui dunia pendidikan dan lembaga terkait sudah banyak terkontaminasi oleh karena proses politisasi dari partai politik yang cenderung oportunistik, merusak, dan mencari kepentingan sesaat. *Ketiga*, kerapuhan politik di Indonesia disebabkan oleh munculnya berbagai kepentingan dan ideologi partai politik yang tidak sejalan dengan jiwa dan jati diri bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila. *Keempat*, Pendidikan politik berjalan di tempat dan semakin kabur terkait dengan keberlanjutan dan proses edukasi bagi warga negara. *Kelima*, banyak partai politik tidak memiliki tujuan dan visi kebangsaan, mereka tidak memiliki mimpi dan orientasi membangun bangsa yang lebih baik sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945, ([www.google.com/Pentingnya Pendidikan Politik/Opini 2014](http://www.google.com/Pentingnya Pendidikan Politik/Opini 2014), diakses 30 Oktober 2014).

Dalam keadaan yang seperti itulah, partai politik harus hadir untuk memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Perekrutan kader partai haruslah selektif sehingga pelaksanaan sistem politik dijalankan secara profesional dan pimpinan partai politik sebagai pemegang tertinggi kebijakan harus membuat legitimasi aturan mengenai hal tersebut sehingga partai politik membuka ruang selebar-lebarnya kepada warga negara untuk menjadi kader partai dengan seleksi yang ketat, murni dan konsekuen. Demikian juga untuk eksternal partai, pendidikan politik diarahkan pada peningkatan minat pemuda atau kader (termasuk warga negara secara umum) untuk berpartisipasi secara sehat dalam perpolitikan.

Partai politik sebagai lembaga politik dapat pula melakukan sosialisasi politik kepada seluruh warga negara. Dengan demikian warga negara mempunyai persepsi yang sama tentang partai politik. Sebab sosialisasi politik sama halnya dengan melakukan pendidikan politik. Menurut Setiadi dan Kolip (2013, hlm.167), keterlaksanaan sosialisasi politik sangat ditentukan oleh:

Lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana seseorang atau individu berada. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses yang berlangsung cukup lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling memengaruhi diantara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Adapun instrumen sosialisasi politik dapat dilakukan melalui, keluarga, teman sebaya, rekan kerja, LSM, maupun kelompok arisan.

Menurut Anggara (2013, hlm.85), sosialisasi politik adalah cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh negara. Hal ini sangat penting untuk dilakukan supaya warga negara bisa memahami apa dan bagaimana sebenarnya pendidikan politik tersebut dalam rangka membentuk karakter kader, simpatisan maupun warga negara secara umum.

Sedangkan fungsi dari partai politik, menurut Damsar (2010, hlm.247-256) antara lain

(a) sebagai wahana representasi politik, (b) sebagai sarana komunikasi politik, (c) sebagai sarana sosialisasi politik, (d) sebagai sarana partisipasi politik, (e) sebagai sarana perekrutan politik, (f) sebagai sarana persuasi dan represi politik (g) sebagai sarana mobilisasi politik, (h) sarana mobilitas sosial, (i) sebagai kendaraan politik, (j) sebagai bunker politik.

Dengan demikian menurut Cangara (2009, hlm.209), ada tiga prinsip dasar dari partai politik, yakni partai sebagai koalisi, partai sebagai organisasi, dan partai sebagai pembuat kebijakan.

Pendidikan politik dapat juga dilakukan di sekolah maupun di perguruan tinggi melalui mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini mengandung arti bahwa sejak kecil seseorang sudah diperkenalkan dengan politik dengan harapan supaya kelak setelah dewasa dapat melaksanakan hak dan kewajibannya terutama dalam bidang politik secara suka rela dan penuh tanggung jawab demi kesuksesan pembangunan di Indonesia.

Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah siswa diajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, yakni dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuang sampah pada tempatnya, menghormati serta menghargai teman yang berbeda baik dari agama, status sosial maupun fisik, menghormati guru, memperkenalkan struktur ketatanegaraan Indonesia secara hirarkis serta dalam kegiatan pemilihan ketua kelas maupun ketua OSIS harus menerima dengan lapang dada siapapun yang terpilih. Namun, hal tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat sekolah dan tingkat perkembangan kognitif siswa.

Budimansyah dalam kata pengantar buku “Kewarganegaraan Indonesia: Dari Sosiologis menuju Yuridis” yang ditulis Winarno (2009, hlm.xx) mengatakan bahwa untuk mengaktualisasikan dimensi pribadi kewarganegaraan, maka pendidikan harus berkembang dan ditingkatkan pada semua siswa, ketetapan hati untuk menentukan kehidupan pribadi mereka dengan cara memberikan ilmu pengetahuan yang kiranya dapat berguna di kemudian hari sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, menurut Budimansyah pengabaian dari dimensi pribadi seseorang (siswa) dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengurangi atau mengganggu usaha untuk mempengaruhi tingkah laku pada bidang kewarganegaraan.

Sementara itu melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, pendidikan politik dapat diberikan melalui pemilihan ketua tingkat, ketua BEM, maupun pemilihan ketua organisasi lainnya yang ada dalam

lingkungan kampus. Sebagai mata kuliah umum, Pendidikan Kewarganegaraan berada di bawah naungan mata kuliah Pancasila dan Kewiraan yang berlaku pada setiap jurusan. Sedangkan sebagai pendidikan disiplin ilmu, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan disiplin ilmu sosial yang digunakan sebagai program pendidikan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di LPTK (IKIP/STKIP/FKIP), (Winarno 2013, hlm.16-17). Disinilah letak dasar-dasar pendidikan politik bagi warga negara yang diberikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Edmonson (1958) dalam Erwin, (2012, hlm.2) mengatakan bahwa “*Civics is the element of political science or that branch of political science dealing with the rights and duties of citizen*” (*Civics* adalah sebagai cabang ilmu politik yang membahas hak dan kewajiban warga dari sebuah negara). Dengan demikian menurut Erwin (2012, hlm.7) esensi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia diarahkan sebagai:

Pendidikan demokrasi untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab serta sekaligus dalam upaya untuk menjadikan warga negara yang baik dan demokratis. Oleh karenanya, tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yakni yang religius, yang nasionalis, yang adil, yang berkemanusiaan dan berkeadaban, serta yang demokratis.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 36 ayat tiga menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan:

(a) peningkatan iman dan taqwa, (b) peningkatan akhlak mulia, (c) peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) tuntutan dunia kerja, (g) perkembangan IPTEKS, (h) agama, (i) dinamika perkembangan global, (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pada pasal 37 ayat satu menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa, (d) matematika, (e) ilmu pengetahuan alam, (f) ilmu pengetahuan sosial, (g) seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan olahraga, (i) keterampilan/kejuruan, (j) muatan lokal.

Dalam ayat dua pada Undang-Undang yang sama juga menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa.

Merujuk pada pengertian pendidikan politik diatas serta adanya muatan kurikulum yang mencantumkan Pendidikan Kewarganegaraan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan politik adalah upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dalam rangka mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat bersama antara pemerintah dan masyarakat yang berada pada suatu wilayah tertentu dalam rangka membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dimana dasar-dasar dari pendidikan politik tersebut dapat dipelajari melalui mata pelajaran maupun mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah serta di Perguruan Tinggi.

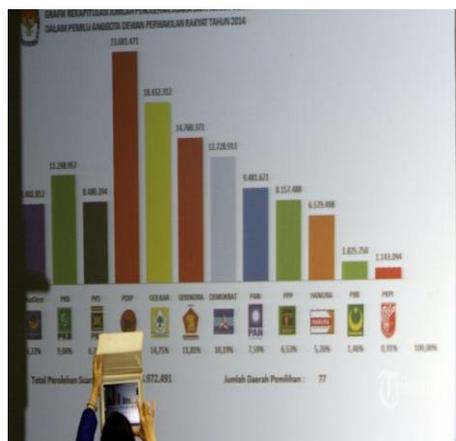
Kota Sintang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, dimana partai politik yang dominan adalah PDI Perjuangan terutama pada pemilu 2014 yang lalu. Hal tersebut diperkuat dengan data hasil rekapitulasi dari KPUD Kabupaten Sintang pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan unggul dari partai-partai yang lainnya yakni dengan perolehan suara mencapai 90.909 atau 17,83 persen, (Tribun News.com. Pemilu legislatif Kabupaten Sintang 2014, diakses 25 Oktober 2014). Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan penulis sajikan dalam bentuk tabel.

No	Partai	Suara	%
1	PDIP	90.909	17,83%
2	Hanura	60.155	11,80%
3	Gerindra	57.592	11,29%
4	Golkar	54.365	10,66%
5	PKPI	47.913	9,40%
6	Demokrat	45.356	8,90%
7	PAN	42.157	8,27%
8	PPP	40.827	8,01%
9	Nasdem	23.464	4,60%
10	PKB	18.181	3,57%
11	PKS	16.647	3,26%
12	PBB	12.334	2,42%
Total		509.900 suara	
BPP		46.355 suara	

Tabel 1. 1 Sumber: KPUD Kabupaten Sintang 2014

Sedangkan data hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat juga menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di posisi pertama dengan perolehan suara mencapai 23.681.471 atau 18,95 persen.

Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 ini ditetapkan melalui surat keputusan KPU No 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Anggota DPR, DPD dan DPRD secara umum dalam Pemilu, yang dibacakan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta, pada hari Jumat (9/4/2014) malam menjelang dini hari, (Tribun News.com. Pemilu legeslatif pusat 2014, diakses 25 Oktober 2014).



Tabel 1.2 Sumber: KPU Pusat 2014

Adapun persoalan yang menyebabkan PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pada pemilu 2014, diantaranya, posisi PDI Perjuangan sebagai oposisi dan pemilih militan atau para pemilih yang fanatik, artinya di Kabupaten Sintang tidak sedikit pemilih yang masih fanatik, baik itu berdasarkan pada suku, agama, kandidat maupun berdasarkan pada ikatan keluarga yang masih terjalin kental. Sebab partai ini merupakan partai yang beraliran nasionalis dengan dasarnya gotong royong yang merupakan hasil pemikiran dari Soekarno sebagai cikal bakal berdirinya PDI Perjuangan dan partai ini juga sudah lama dikenal masyarakat sejak zaman Orde Baru.

Disamping itu juga partai ini merupakan fusi dari lima partai, yakni PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba yang pada dasarnya berbeda konsep, lambang, asas, tujuan dan fungsi, dimana partai-partai tersebut bersedia

Juri, 2015

**MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meleburkan diri dalam satu wadah, yakni PDI, yang mana pada tahun 1999 berubah nama menjadi PDI Perjuangan berdasarkan hasil Munas IV di Bali.

Disisi lain kebanyakan para orang tua yang tidak mempunyai pendidikan tinggi bahkan ada yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, ketika pemilu mereka ini diwakilkan oleh keluarganya yang lain (terutama yang telah mempunyai pendidikan) sehingga suara menjadi menumpuk di satu partai dan pada satu kandidat. Fenomena ini terutama banyak terjadi di pedesaan yang mana mayoritas dari warganya belum mengenyam pendidikan.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam bidang politik terutama yang berkaitan dengan pendidikan politik dalam membentuk karakter bertanggung jawab warga negara karena sampai saat ini karakter politisi sangat jauh dari nilai moral serta keberpihakkannya terhadap masyarakat. Partai politik saat ini lebih berorientasi pada massa yang banyak, dengan demikian mengabaikan pendidikan politik. Padahal pendidikan politik sangat penting guna memberikan pemahaman ataupun pencerahan kepada kader, pengurus, simpatisan, serta masyarakat luas. Dengan adanya pendidikan politik yang dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan dapat meminimalisir berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas, terutama dalam pemilu.

Melihat besarnya minat atau tanggung jawab warga negara dalam pemilihan umum terutama para pemilih, mestinya bisa memberikan motivasi tersendiri bagi PDI Perjuangan untuk lebih giat lagi dalam melakukan pendidikan politik kepada kader, simpatisan dan seluruh warga negara supaya elektabilitas partai ini bisa terus dipertahankan guna menunjang pembangunan bangsa yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, bertanggung jawab, makmur dan berkeadaban serta berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menjadi cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Adapun tugas dan tanggung jawab PDI Perjuangan berdasarkan AD/ART partai terhadap pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat luas, diantaranya:

- (a) menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara, (b) sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat, (c) sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan

Juri, 2015

**MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan anggota partai, (d) sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai, (e) mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa, (f) melakukan pendidikan politik secara berkesinambungan dalam bentuk program kerja, (g) melaksanakan visi dan misi partai secara efektif dan efisien, (h) bersama-sama dengan pemerintah merealisasikan kepentingan publik yang mengandung hajat hidup orang banyak.

Sementara itu negara mempunyai kewajiban untuk membentuk karakter warganya melalui pendidikan politik. Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan cara berperilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara serta membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain pendidikan karakter mengajarkan anak didik berpikir cerdas, berkarakter sehat dan mengaktivasi otak tengah secara alami, Khan (2010, hlm.1). Sedangkan Aqib (2012, hlm.26) mengatakan bahwa, tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk mengurangi perilaku destruktif pada anak, remaja, dan orang dewasa.

Pembangunan karakter yang pertama dan paling utama sesungguhnya dimulai dari keluarga, khususnya orang tua. Orang tua yang baik melakukan lebih dari sekedar memberi kasih sayang dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Orang tua juga harus mencanangkan bagaimana mereka akan membentuk karakter anaknya supaya kelak di kemudian hari dapat menjadi insan yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam keluarga pula seseorang mulai diberikan nasihat supaya bisa bertanggung jawab terutama terhadap tugas yang diberikan oleh orang tua maupun tugas yang diberikan oleh guru dan dosen dalam dunia pendidikan dengan harapan apabila hal tersebut sudah dibiasakan semenjak dini, maka besar kemungkinan karakter bertanggung jawabnya akan terbentuk dengan baik.

Pendidikan karakter di sekolah dapat dipelajari melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yakni dengan membiasakan para siswa untuk berperilaku jujur, bertutur sapa sopan, menghormati guru, menghormati teman yang berbeda agama, suku, budaya maupun status sosial, menjaga kebersihan lingkungan dan belajar secara giat. Oleh karena itu menurut Winarno (2013, hlm.117) pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah diharapkan dapat

membentuk pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) bagi seluruh siswa.

Menurut Branson sebagaimana yang dikutip Winarno (2009, hlm.13), ada tiga kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yakni (a) *civic knowlegde* (pengetahuan kewarganegaraan), (b) *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), (c) *civic disposition* (karakter kewarganegaraan). Selanjutnya *civic disposition* terdiri dari karakter privat dan karakter publik. Karakter privat terdiri dari; pertanggungjawaban moral, disiplin diri, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sedangkan karakter publik terdiri dari; taat terhadap aturan, sikap kritis, sopan, kesediaan mendengar, kemauan bernegosiasi dan kompromi.

Sedangkan pendidikan karakter di Perguruan tinggi dapat diberikan kepada mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yakni dengan membiasakan mahasiswa untuk membangun budaya demokrasi, yakni lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat pada organisasi yang ada di lingkungan kampus. Dalam hal ini Kesuma, dkk (2012, hlm.7) berpendapat bahwa kemampuan yang perlu dikembangkan pada peserta didik di Indonesia adalah kemampuan mengabdikan kepada Tuhan yang menciptakannya, kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dengan demikian, karakter bertanggung jawab warga negara setidaknya dapat dibentuk melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik secara kontinue kepada pengurus, kader, simpatisan dan seluruh warga negara dengan cara melaksanakan berbagai program yang telah disusun secara efektif dan efisien guna menunjang pembangunan negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 khususnya pada alenia keempat. Sedangkan di sekolah maupun di Perguruan Tinggi materi pendidikan politik dapat diberikan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk

Juri, 2015

**MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membentuk karakter bertanggung jawab siswa dan mahasiswa sebagai bagian dari warga negara terutama dalam bidang pendidikan.

Disinilah letak keterkaitan antara pendidikan politik dengan membentuk karakter warga negara dalam menunjang Pendidikan Kewarganegaraan karena pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri ingin mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya yakni manusia yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, mempunyai kecerdasan intelektual, emosional, kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan daya saing global.

Menurut Sapriya, dalam pidatonya pada saat pengukuhan sebagai Guru Besar tanggal 26 April 2012, bahwa:

Warga negara Indonesia yang baik yang dicita-citakan atau diharapkan adalah warga negara yang patriotik, demokratis, dan Pancasila. Untuk itulah sesuai dengan tugasnya, komunitas disiplin Pendidikan Kewarganegaraan harus terus-menerus secara berkelanjutan dan berkesinambungan membangun dan mengembangkan batang tubuh keilmuan (*the body of knowledge*) yang dapat memperkuat status keilmuannya.

Sedangkan kriteria manusia Indonesia yang baik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 khususnya pada pasal tiga “.....manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mah Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan data dan pemikiran di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam lagi mengenai keberadaan partai politik terutama dalam membentuk karakter bertanggung jawab warga negara melalui pendidikan politik. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul dan permasalahan ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **“Membentuk Karakter Bertanggung Jawab Warga Negara Melalui Pendidikan Politik (Studi Kasus pada Partai Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Juri, 2015

**MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan latar belakang di atas dan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan tesis ini, diantaranya: *Pertama*, banyaknya partai politik di Indonesia yang muncul menjelang pemilihan umum; *Kedua*, kurang adanya upaya pengkaderan kepada masyarakat secara sungguh-sungguh; *Ketiga*, partai politik belum jelas dalam membentuk karakter politik kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas; *Keempat*, partai politik kurang jelas dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan; *kelima*, partai politik belum melakukan secara rutin pendidikan politik kepada masyarakat, oleh karenanya karakter warga negara terutama karakter yang bertanggung jawab sangat sulit terbentuk melalui partai politik. Karena itu fokus kajian yang diulas oleh penulis adalah berkaitan dengan bagaimana membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab melalui pendidikan politik (Studi Kasus pada partai politik PDI Perjuangan di kabupaten Sintang) Kalimantan Barat.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk program pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang?
- b. Bagaimanakah proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang?
- c. Karakter bertanggung jawab warga negara seperti apakah yang ingin dibentuk oleh PDI Perjuangan melalui pendidikan politik di Kabupaten Sintang?
- d. Kendala apa saja yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Sintang dan apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
- e. Apakah hasil dari program pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam membentuk karakter bertanggung jawab warga negara di Kabupaten Sintang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pembentukan karakter pengurus, kader, simpatisan serta masyarakat luas melalui pendidikan politik yakni partai politik PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pengambil atau pemangku dan pengembang kebijakan dalam menumbuhkembangkan karakter warga negara menuju Indonesia yang lebih baik terutama untuk menyongsong generasi emas bangsa Indonesia pada tahun 2045 (100 tahun Indonesia merdeka), dimana dalam generasi emas tersebut bangsa Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara maju terutama di Asia bahkan di dunia. Untuk itu, generasinya harus dipersiapkan dari sekarang terutama dalam pembentukan karakter melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik bersama pemerintah.

Menurut Creswell (2010, hlm.167), tujuan penelitian adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksud atau gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah mencakup berbagai informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengkaji dan menganalisis bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang
- b. Menganalisis proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang.
- c. Mengkaji konstelasi karakter bertanggung jawab warga negara melalui pendidikan politik di Kabupaten Sintang.
- d. Menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Sintang.
- e. Mendeskripsikan hasil program pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam membentuk karakter bertanggung jawab warga negara di Kabupaten Sintang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat dari Segi Teoritis**

Adapun manfaat penelitian ini dapat kiranya dijadikan sebagai referensi atau panduan dalam pengembangan keilmuan kewarganegaraan yang berbasis pada masyarakat terutama dalam bidang politik karena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mau tidak mau pasti akan bersentuhan dengan politik dan secara lebih khusus lagi adalah membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

### **1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan**

Pendidikan politik seyoginya dilaksanakan oleh setiap partai politik kepada pengurus, kader, simpatisan serta masyarakat luas guna memberikan pemahaman supaya setiap warga negara selalu siap sedia berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan dalam rangka menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang berkarakter baik pula. Pendidikan politik dapat diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik formal, nonformal, serta informal guna membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, lingkungan pendidikan, bangsa maupun negara. Disamping itu pula pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan secara berkesinambungan dapat membentuk karakter warga negara yang baik serta bertanggung jawab. Untuk itu pendidikan politik menjadi penting diberikan kepada setiap pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat luas sejak sedini mungkin.

### **1.4.3 Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal terutama terkait dengan hasil dari program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan guna membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pertahanan keamanan.

#### **1.4.4 Manfaat Secara Praktis**

Selain dapat memberikan manfaat dari segi teoritis, dari segi kebijakan, dan dari segi isu serta aksi sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yakni berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Diketuainya bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang.
- b. Diketuainya proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang.
- c. Diketuainya karakter bertanggung jawab warga negara yang ingin dibentuk oleh PDI Perjuangan melalui pendidikan politik di Kabupaten Sintang.
- d. Diketuainya kendala dan upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik terhadap warga negara di Kabupaten Sintang.
- e. Diketuainya hasil program pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam membentuk karakter bertanggung jawab warga negara melalui pendidikan politik di Kabupaten Sintang.

#### **1.5 Struktur Organisasi Penulisan Tesis**

Sebuah karya ilmiah yang baik, (skripsi, tesis dan disertasi) paling tidak memuat bagian-bagian sebagai berikut: (1) halaman judul, (2) halaman pengesahan, (3) lembar persetujuan dan pengesahan, (4) pernyataan tentang keaslian tesis, (5) ucapan terima kasih, (6) kata pengantar, (7) surat pernyataan, (8) lembar persembahan, (9) abstrak: Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, (10) daftar isi, (11) daftar tabel, (12) daftar gambar, (13) daftar lampiran, (14) daftar pustaka, (15) riwayat penulis. Sedangkan isinya terdiri dari lima BAB, dimana

antara setiap BAB-nya saling berhubungan secara runtut. Urutan penulisannya di mulai dari BAB satu sampai BAB lima secara berurutan.

BAB satu memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi penulisan tesis, dan definisi operasional. BAB dua memuat kajian pustaka yang memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yakni berupa teori yang mendukung dari proses penelitian yang diuraikan secara sistematis. BAB tiga memuat metodologi penelitian, yakni berupa cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data, serta langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan pada saat pelaksanaan penelitian. BAB empat memuat temuan dan pembahasan hasil penelitian, yakni berupa gambaran umum lokasi tempat dilaksanakannya penelitian, deskripsi pengolahan data menggunakan instrumen seperti yang diuraikan dalam BAB tiga, dan pengolahan data dengan menggunakan berbagai teori yang mendukung yang merujuk pada BAB dua. BAB lima memuat simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yakni penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diolah pada BAB empat menggunakan instrumen yang sesuai, memberikan implikasi serta membuat rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

## **1.6 Definisi Operasional**

Guna menjelaskan maksud dan batasan dari sebuah penelitian, diperlukan suatu definisi operasional yang merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap mengenai apa yang seharusnya diamati ketika melakukan penelitian dilapangan. Untuk itu, penulis akan mengemukakan beberapa batasan penelitian ini supaya antara pembaca dengan penulis mempunyai persepsi yang sama dengan istilah-istilah dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dapat penulis jelaskan terkait dengan hasil penelitian ini yakni “Membentuk Karakter Bertanggung Jawab Warga Negara melalui Pendidikan Politik (studi Kasus pada Partai Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang)”, adalah sebagai berikut:

### 1.6.1 Karakter Bertanggung Jawab

Karakter adalah sikap atau perbuatan individu dalam kehidupan sehari-hari dimanapun individu tersebut berada dalam merespon segala sesuatu dimana karakter individu tersebut yang membedakannya dari individu lain. Samani dan Hariyanto (2012, hlm.41), mengatakan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan bertanggung jawab adalah kemauan dari seseorang untuk memikul segala pekerjaan ataupun tugas yang diberikan kepadanya dengan segenap hati dan penuh kejujuran. Jadi dengan demikian karakter bertanggung jawab adalah cara berpikir dan berperilaku yang khas dari setiap individu untuk hidup dan bekerjasama dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan segenap hati dan penuh kejujuran.

### 1.6.2 Warga Negara

Warga Negara adalah orang atau sekelompok orang yang berada dalam wilayah negara dimana ia tinggal yang dibuktikan dengan identitas yang sah. Menurut Komalasari dan Saifullah (2012, hlm.1), istilah warganegara merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni *Staatsburger*. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *citizen*. Sedangkan dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *Citoyen*. Jadi, warga negara adalah anggota negara.

### 1.6.3 Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah segala usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk mencerdaskan dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara supaya karakter kader partai politik serta warga negara pada umumnya bisa terbentuk dengan baik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatakan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (*Pasal 1 Angka 4*). Menurut Setiadi dan

Kolip (2013, hlm.282), pendidikan politik dipelajari seumur hidup oleh manusia melalui pendidikan formal, kursus, penataran, dan kaderisasi maupun secara tidak sengaja lewat pengalaman individual dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

#### **1.6.4 Partai Politik**

Partai politik adalah sebuah organisasi yang menghimpun individu untuk bergabung dalam sebuah wadah kesatuan dimana susunan kepengurusannya dimulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, baik daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua bahkan sampai pada level kecamatan dan kelurahan dan sistem kerjanya menggunakan sistem komando atau perintah yakni dari atasan kepada bawahan yang merupakan rangkaian sistem serta mempunyai visi misi yang jelas maupun tujuan yang sama. Dalam hal ini Budiardjo (2008:404) mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dan tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

#### **1.6.5 Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan (*civics*) merupakan mata pelajaran serta mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, dalam arti manusia Indonesia yang cakap, aktif, kreatif, inovatif, mandiri, jujur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing, berperilaku sopan, dan menghargai sesama dalam kemajemukan.

Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, mencantumkan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, supaya siswa memiliki kemampuan:

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.